

## ANALISIS EFEK LITERASI KEUANGAN DAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP AKTIVITAS UMKM DI KOTA SURAKARTA

Johadi<sup>1</sup>, Gathot Widyantara<sup>2</sup>, Yanuar Rachmansyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret

E-mail : [jwibisono@staff.uns.ac.id](mailto:jwibisono@staff.uns.ac.id)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia

E-mail : [widyantara.gt@gmail.com](mailto:widyantara.gt@gmail.com)

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BPD Jawa Tengah

E-mail: [yanuar\\_r@gmail.com](mailto:yanuar_r@gmail.com)

### Abstract

The existence and role of MSMEs are needed to mobilize the economic sector. The government will increase the social safety net and financial literacy program to increase this role, especially increasing the number of MSMEs, both family and non-family. This study aims to measure the effects of financial literacy and social safety nets on increasing MSME activity. Its objects are Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially Batik traders, who have received the social safety net program and banking sector credit facilities in Surakarta City. The dependent variable is MSME activity at the household level, with demographic independent variables (the type of work and education level), social safety net index, financial literacy index, credit facilities, and total sales. Logit regression analysis technique is used to test the relationship between these variables. The results show that the level of education and credit facilities have a significant positive effect on increasing the activity of MSMEs at the household level in Surakarta. Based on the research results, the researchers hope that local governments can design policies to increase household-level MSME activities, especially through increasing levels of education and access to credit to MSMEs in Surakarta.

**Keywords:** Activities MSMEs, Financial Literacy, Social Safety Net, Household.

### Abstrak

Eksistensi dan peran UMKM diperlukan untuk menggerakkan sektor perekonomian. Peningkatan program jaring pengaman sosial dan literasi keuangan dilakukan pemerintah guna meningkatkan peran tersebut, terutama meningkatkan jumlah UMKM baik berasal dari keluarga dan bukan keluarga. Penelitian ini bertujuan mengukur efek literasi keuangan dan jaring pengaman sosial terhadap peningkatan aktivitas UMKM. Objeknya adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya pedagang Batik, yang telah menerima program jaring pengaman sosial dan fasilitas kredit sektor perbankan di Kota Surakarta. Variabel dependennya adalah aktivitas UMKM dilevel rumah tangga, dengan variable independen demografi (jenis pekerjaan dan jenjang pendidikan), indek jaring pengaman sosial, indek literasi keuangan, fasilitas kredit, dan total penjualan. Teknik analisis regresi logistik digunakan untuk menguji hubungan antar variable tersebut. Hasil menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan fasilitas kredit berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan aktivitas UMKM level rumah tangga di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap pemerintah daerah dapat mendesain kebijakan untuk meningkatkan aktivitas UMKM level rumah tangga khususnya melalui peningkatan jenjang pendidikan, dan akses kredit ke pelaku UMKM di Kota Surakarta.

**Kata Kunci:** Aktivitas UMKM, Jaring Pengaman Sosial, Literasi Keuangan, Rumah Tangga.

### 1. Pendahuluan

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing pelaku usaha di dalam negeri dilakukan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan jaring pengaman sosial dan kebijakan beragam insentif bagi pelaku usaha.

Dengan kondisi terbatasnya anggaran pemerintah (Pusat dan Daerah), pemerintah tetap berusaha optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beragam program jaring pengaman sosial dilakukan pemerintah seperti program jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, subsidi

listrik, air bersih dan program pangan rakyat. Sedangkan kebijakan insentif pelaku usaha terdiri dari kemudahan dan percepatan perijinan, pengurangan dan pelonggaran pembayaran pajak, subsidi listrik untuk industri dan pelaku usaha UMKM, program pengembangan jaring pemasaran global yang digerakan oleh pemerintah, insentif dana murah (program KUR), program pengembangan SDM, dan insentif pengembangan manajerial.

Beragam program masih secara ambigu belum secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya saing pelaku usaha. Menurut Tran (2016) beragam program kebijakan akan tidak efektif jika kontrol atas program tersebut lemah. Artinya diperlukan fungsi kontrol yang kuat oleh Pemerintah tatkala menjalankan program. Sementara itu ditinjau dari upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, hasil program jaring pengaman sosial pun tidak signifikan. Penerima program cenderung digunakan untuk mengakumulasi aset fisik atau *tangible asset*. Bukti empiris yang dilakukan pemerintahan China menunjukkan bahwa program subsidi di bidang kesehatan (pengurangan biaya medis) efektif dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tabungan masyarakat (Imrohoroglu dan Zhao, 2017).

Faktor lain yang perlu diperhatikan Pemerintah untuk menjamin keberhasilan beragam program jaring pengaman sosial untuk meningkatkan kesejahteraan (peningkatan pendapatan) adalah adanya kepastian tingkat keamanan pangan, kemampuan produksi, peningkatan program inklusi keuangan dan perubahan standar hidup (Swamy, 2014). Temuan Swamy (2014) dikuatkan oleh Dotsey et al (2015) yang menunjukkan bahwa penghapusan program Jamsostek bagi tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat, dengan catatan penghapusan program tersebut di ikuti dengan peningkatan aktivitas produksi rumah tangga dan peningkatan permintaan riil produksi rumah tangga tersebut. Dengan kata lain, kemampuan kontrol yang optimal, kepastian terhadap *supply* produk kebutuhan

dasar, keberhasilan program inklusi keuangan, perubahan dalam pengelolaan aset dan standar hidup masyarakat adalah faktor yang menentukan keberhasilan program jaring pengaman pemerintah.

Sementara itu di Indonesia penelitian mengenai dampak jaring pengaman sosial terhadap peningkatan aktivitas UMKM terutama usaha keluarga masih sangat terbatas. Kecenderungan penelitian mengenai dampak jaring pengaman sosial terkait dengan pengentasan kemiskinan dan desain program jaring pengaman sosial tersebut. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan Dhanani dan Islam (2002) menemukan pentingnya program perlindungan sosial kepada masyarakat miskin terutama dalam bentuk program beasiswa pendidikan, kesehatan dan subsidi pangan efektif dalam memerangi kemiskinan terutama saat periode krisis. Sehingga tingkat keparahan kemiskinan tidak semakin dalam ketika terjadi hiper inflasi akibat adanya krisis. Sementara itu menurut Sumarto et al (2002) jaring pengaman sosial sangat diperlukan sebagai penyangga ketika krisis agar tidak berlanjut ke krisis sosial dan politik. Selanjutnya dari sisi efektifitas jaring pengaman sosial ditentukan oleh *up date* data database penerima jaring pengaman sosial secara geografis dan sampai dilevel rumah tangga, serta peran edukasi masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 maka penelitian ini dilakukan di Koridor Jawa dengan tujuan untuk memperkuat Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Fokus kegiatan ekonomi utama di koridor Jawa adalah industri makanan dan minuman, tekstil, permesinan, transportasi, perkapalan, alutsista, telematika, metropolitan Jadedotabek. *Sample* untuk Koridor Jawa adalah Propinsi Jawa Tengah khususnya Kotamadya Surakarta. Karakteristik Kota Surakarta merupakan salah satu Kota dengan keunikan tertentu baik dari sisi historis maupun sisi peran dalam pembangunan perekonomian regional di wilayah Jawa Tengah.

Sektor ekonomi yang menopang perekonomian Kota Surakarta adalah sektor perdagangan, Hotel dan Restoran, Industri pengolahan dan keuangan, persewaan dan jasa usaha rata – rata sebesar 61,78 %. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB rata – rata sebesar 27,75 % atau sebesar Rp. 1.730 trilyun. Tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut adalah rata – rata sebesar 163.542 orang, sementara sektor perdagangan mampu menyerap tenaga kerja rata – rata sebesar 73.459 dalam dua tahun (2014-2015). Oleh karena itu dalam penelitian ini fokus pada sektor sektor perdagangan khususnya perdagangan batik di Kota Surakarta. Penelitian sebelumnya terkait efektivitas jaring pengaman sosial yang ditentukan oleh kemampuan produksi rumah tangga dan inklusi keuangan (Swamy, 2014); permintaan riil terhadap produksi rumah tangga tinggi (Dotsey et al, 2015); fungsi kontrol pemerintah kuat (Tran, 2016) dan mengakumulasi asset fisik atau *tangible assets* (Imrohoroglu dan Zhao, 2017). Sedangkan di Indonesia lebih menekankan dampak jaring pengaman sosial terhadap dinamika kemiskinan (Dhanani dan Islam, 2002) serta desain efektivitas jaring pengaman sosial (Sumarto, et al, 2002).

Hasil penelitian tersebut masih bersifat parsial dan memerlukan pengembangan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan indikator yang menentukan tentang *effect* jaring pengaman sosial dengan *scope* yang lebih luas terhadap peningkatan aktivitas ekonomi Rumah Tangga. Beberapa faktor pembaharuan dalam penelitian ini adalah *pertama* memperhatikan faktor demografi dalam menentukan peningkatan aktivitas ekonomi rumah tangga antara lain faktor jenis pekerjaan dan jenjang pendidikan. *Kedua* faktor literasi keuangan dan kemudahan akses keuangan khusus perbankan, *Ketiga* pengembangan jaring pengaman sosial dengan membentuk indek jaring pengaman sosial dengan didasarkan pada beberapa program jaring pengaman sosial seperti subsidi

pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, perumahan dan produk pangan), dan *keempat* adalah faktor tingkat permintaan terhadap hasil produksi rumah tangga yang diukur dengan *total sales / total product*. Penelitian ini berusaha menguji effect dari faktor – faktor pembaharuan tersebut yang menentukan tingkat aktivitas UMKM di Rumah Tangga di Kota Surakarta, khususnya rumah tangga yang melakukan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan batik.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Schumpeter (1950; 1961) dalam Naude (2013) menjelaskan wirausaha merupakan agen perubahan dan mengkoordinasikan factor produksi. Oleh karena itu wirausaha yang mengikutinya disebut “Wirausaha Schumpeterian” dengan kemampuan inovasi yang lebih baik. Peran wirausaha menjadi penting tatkala pembangunan ekonomi meningkat signifikan dimana pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan pengetahuan dan persaingan. Prasyarat adanya kemajuan pengetahuan dan tingkat persaingan menjadi factor penentu meningkatnya peran wirausaha dalam pembangunan perekonomian. Karena kemajuan pengetahuan dan tingkat persaingan menjadi katalisator untuk secara cepat dan agresif melakukan inovasi. Keberhasilan program jaring pengaman sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan kontrol oleh entitas yang menerima program tersebut. Selanjutnya menurut Kanbur (1979) dalam Naude (2013) mendeskripsikan bahwa wirausaha merupakan seseorang yang dapat mengelola fungsi produksi dengan membayar upah pekerja, dan menanggung risiko ketidakpastian. Pandangan ini sangat relevan berlaku terutama dinegara – negara berkembang, dimana factor ketidakpastiannya tinggi, sehingga wirausaha dalam skala mikro kecil dan menengah dianggap pelaku ekonomi dengan profil risiko tinggi. Impilkasi atas kedua definisi tersebut, maka Pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan

pengetahuan, tingkat persaingan, dan menurunkan tingkat ketidakpastian guna mendorong peran wirausaha agar lebih signifikan dalam pembangunan perekonomian.

Bentuk kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah antara lain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Instrumen dan waktu yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan wirausaha terutama dengan skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Misalnya terkait dengan implemntasi kebijakan fiskal, instrumen jaring pengaman social dalam bentuk subsidi atau *transfer payment* yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan tidak efektif jika masyarakat yang menerima program tersebut kontrolnya lemah yang selanjutnya berdampak pada kegagalan program tersebut (Tran, 2016). Apalagi, faktanya pemerintah menghadapi kendala keterbatasan anggaran, sehingga kemampuan kontrol bagi penerima program jaring pengaman sosial sangat penting dan menentukan keberhasilan program tersebut (Tran, 2016).

Sementara di China terdapat hasil yang menunjukkan bahwa reformasi jaminan sosial yang diukur dengan peningkatan modal per tenaga kerja dan peningkatan usia pensiun, belum mampu mendorong peningkatan output per tenaga kerja. Tetapi jika reformasi jaminan sosial diukur dari rasio usia penduduk produktif dengan modal tenaga kerja dan faktor harga, maka akan berdampak pada peningkatan akumulasi modal fisik yang selanjutnya berimplikasi pada peningkatan return dengan tenaga kerja. Hasilnya berbeda jika dihubungkan dengan dampak perubahan demografi terhadap akumulasi capital. Sedangkan efek belanja medis (kesehatan) yang subsidi pemerintah berdampak pada peningkatan tabungan rumah tangga.(Imrohoroglu & Zhao, 2017). Sedangkan dari sisi yang lain, suatu penelitian menjelaskan bahwa perubahan tingkat keamanan pangan, perubahan standar hidup, perubahan tingkat produksi, perubahan dalam

menciptakan asset (peningkatan kepemilikan asset), dan peningkatan program inklusi keuangan berdampak pada peningkatan perubahan tingkat pendapatan masyarakat kurang mampu di India baik laki – laki dan perempuan (Swamy, 2014). Sementara itu terdapat *trade-off* antara program reformasi jaminan sosial dengan tingkat produksi rumah tangga. Jika pemerintah menghapus program jamsostek tidak akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, ketika aktivitas produksi rumah tangga, dan diikuti dengan peningkatan aktivitas konsumsi berbagai barang yang dihasilkan rumah tangga tersebut (Dotsey, Li, & Yang, 2015).

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara peran sektor perbankan dengan sektor riil antara lain : pertama penelitian yang menguji keberadaan bank domestik di Taiwan pada saat krisis keuangan tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, tetapi justru bank asing. Kinerja perusahaan dihubungkan dengan reputasi pinjaman dan rasio modal pinjaman bank terhadap modal sendiri, profitabilitas, pertumbuhan peluang, ukuran dan pengalaman perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari bank (Fok, Chang, & Lee, 2004).

Kedua pengembangan sektor riil seperti usaha mikro kecil dan menengah dan sektor informal ditentukan oleh tingkat pembangunan perbankan di daerah. Peningkatan pembangunan perbankan diartikan dengan peningkatan kemudahan akses fasilitas produk perbankan, khususnya kredit perbankan (Raj, Sen, & Kathuria, 2014). Hal lain yang perlu diperhatikan selain faktor pembangunan perbankan adalah kualitas infrastruktur khususnya kualitas jalan. Semakin tinggi tingkat kualitas jalan, maka akan mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha (kelompok usaha keluarga dan non keluarga), yang berdampak pada peningkatan kinerja sektor riil, dan. Ketiga penelitian yang mengungkapkan fakta di Italia dengan karakteritik usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, menunjukkan bahwa hutang bank (sumber permodalan dari

bank) berpengaruh negatif terhadap kinerja UMKM, ketika struktur pasar perbankan kurang kompetitif (Agostino & Trivieri, 2010). Peningkatan akses kredit sektor perbankan dalam jangka panjang mendorong peningkatan level inovasi perusahaan terutama bagi perusahaan yang tingkat ketergantungan keuangan terhadap sektor perbankan tinggi (Xin et al, 2016). Penelitian Xin et al (2016) menunjukkan bahwa kemudahan akses keuangan bagi sektor riil berimplikasi pada peningkatan inovasi perusahaan.

### 3. Metode Penelitian

Sampel dan teknik sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha Rumah Tangga perdagangan Batik di Kota Surakarta. Jumlah pelaku usaha Rumah Tangga perdagangan Batik di Kota Surakarta tidak teridentifikasi secara pasti. Sehingga digunakan teknik sampling dengan pendekatan *purposive random sampling*. Teknik *purposive random sampling* mensyaratkan kriteria tertentu agar pelaku usaha perdagangan batik di Kota Surakarta dapat dijadikan sampel. Oleh karena itu pelaku usaha perdagangan batik yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian adalah: (1) Di awal menjalankan usaha pernah menerima program jaring pengaman sosial dari Pemerintah Kota Surakarta yang terdiri dari program di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, subsidi listrik, air bersih, dan subsidi perumahan.; (2) Pengusaha rumah tangga perdagangan batik pernah mendapatkan fasilitas kredit / pembiayaan dari lembaga keuangan.; (3) Pengusaha rumah tangga tersebut masih memiliki rekening simpanan pada lembaga keuangan (Bank / Non Bank) yang telah memberikan fasilitas kredit / pembiayaan.; (4) Pengusaha tersebut minimal memahami produk pendanaan dan produk kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diikuti dengan penggunaan produk lembaga keuangan tersebut khususnya kredit baik kredit investasi dan modal kerja.; (5) Pengusaha perdagangan batik tersebut, jenis usahanya dibedakan berdasarkan proses

pembentukannya dengan melibatkan keluarga (disebut usaha keluarga) dan yang melibatkan non keluarga (teman, investor, dll) yang dikategorikan usaha non keluarga. Dengan didasarkan pada kriteria tersebut maka diperoleh jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 pengusaha perdagangan batik yang ada di Kota Surakarta.

Teknik Analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah *multiple regression* dengan pendekatan *logit regression*. Untuk menguatkan temuan penelitian peneliti melakukan wawancara dengan para ahli (*expertise*) dibidang terkait dengan *delphi methods*. Objek penelitian ini adalah sektor perdagangan khususnya perdagangan Batik di Kota Surakarta. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan data primer dalam 2 tahun terakhir (2015 - 2016). Data primer diperoleh melalui survey dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian, wawancara mendalam dengan *expertise* dan pemangku kepentingan (*delphi methods*). Sumber data sekunder untuk mendukung penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik Daerah dan Dinas terkait khususnya dinas perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Sedangkan data primer diperoleh dari hasil survey, wawancara mendalam dengan *expertise* dan pemangku kepentingan di Daerah Kota Surakarta. Detail teknik analisis yang menggambarkan interaksi antar variabel penelitian dalam penelitian ini adalah:

$$W_{di} = \beta_0 + \beta_1 JP_{di} + \beta_2 JD_{di} + \beta_3 LKRT_{di} + \beta_4 IJPS_{di} + \beta_5 LFK_{di} + \beta_6 TP_{di} + e_t \quad (2.1)$$

Dimana:  $W_{di}$  = Wirausaha (Keluarga dan Non Keluarga),  $JP_{di}$  = Jenis Pekerjaan (Tetap, Kontrak),  $JD_{di}$  = Jenjang Pendidikan,  $LKRT_{di}$  = Literasi Keuangan Rumah Tangga (Tingkat Pengetahuan Produk Perbankan),  $IJPS_{di}$  = Program Jaminan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Air Bersih, Listrik, dan Makanan Pokok),  $LFK_{di}$  = Fasilitas Kredit (Modal kerja dan Investasi) dan  $TP_{di}$  = Permintaan Pasar (*Total Sales/Total Product*)

**4. Hasil Dan Pembahasan**

Deskriptif Statistik menjelaskan jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 pelaku usaha rumah tangga perdagangan Batik di Kota Surakarta. Dengan menggunakan analisis deskriptif maka diperoleh gambaran pelaku usaha perdagangan batik di Kota Surakarta. Aktivitas UMKM yang dilakukan oleh Rumah Tangga dengan usaha utama adalah perdagangan batik di Kota Surakarta dengan nilai minimal 0 (artinya jenis usaha yang dilakukan oleh Rumah Tangga adalah Non Usaha Keluarga, dan nilai maksimal 1 yang menjelaskan jenis usaha keluarga). Jumlah responden yang diambil dalam

penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Responden yang memiliki usaha keluarga sebesar 91 responden atau (91 persen) dan responden yang memiliki usaha non keluarga adalah 9 responden atau 9 persen. Selanjutnya variable jenis pekerjaan responden saat awal memulai aktivitas UMKM. Nilai 0 menjelaskan jenis pekerjaan kontrak dan 1 adalah tetap. Jumlah responden yang saat awal memulai usaha keluarga dengan jenis pekerjaan tetap adalah sebesar 69 responden atau 69 persen dan 31 responden atau 31 persen dengan status pekerjaan kontrak. Statistik tersebut menunjukkan bahwa status pekerjaan yang tetap lebih dominan dibandingkan dengan status pekerjaan kontrak.

Tabel 1. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Uraian	Min	Max	Mean	Std. Dev	N
Wirausaha (Keluarga dan Non Keluarga)	0.00	1.00	0,91	0,28	100
Jenis Pekerjaan	0.00	1.00	0,69	0,46	100
Jenjang Pendidikan	0.00	4.00	2,87	1,04	100
Literasi Keuangan Rumah Tangga	0,11	0,67	0,33	0,14	100
Indek Jaring Pengaman Sosial	0,17	0,67	0,41	0,15	100
Fasilitas Kredit	0.00	150.00	26,21	32,73	100
Persediaan Barang Dagangan	70.00	13800.00	636.00	1590,45	100
Penjualan Barang Dagangan	50.00	12450.00	539.00	1459,04	100

Sumber: Data Primer, 2017 (diolah)

Selanjutnya variable jenjang pendidikan, variable tersebut diklasifikasikan dalam lima kategori yaitu 0 untuk responden dengan jenjang pendidikan tidak atau tidak tamat sekolah, 1 untuk lulusan SD/MI, 2 untuk SMP/MTS, 3 untuk SMA/MA dan 4 untuk lulusan Diploma / Sarjana). Jumlah responden yang tidak sekolah dan atau tidak tamat sekolah adalah sebesar 5 responden atau 5 persen, lulusan SD/MI 5 responden atau sebesar 5 persen, lulusan SMP/MTS sebesar 16 responden atau sebesar 16 persen, lulusan SMA/MA sebesar 46 responden atau 46 persen dan lulusan Diploma / Sarjana sebesar 28 responden atau 28 persen. Berdasarkan jenjang pendidikan lulusan SMA/MA dan lulusan

Diploma / Sarjana mendominasi pelaku usaha perdagangan batik di Kota Surakarta.

Variabel lainnya menunjukkan bahwa indek inklusi keuangan pelaku usaha perdagangan Batik di Kota Surakarta minimal sebesar 0,11 artinya responden tersebut pernah mengunakan 1 kali produk layanan lembaga keuangan. Nilai maksimal indek literasi keuangan Rumah Tangga adalah sebesar 0,67 atau memahami dan pernah menggunakan 6 produk layanan lembaga keuangan dari 9 produk layanan yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Tingkat rata – rata indeks literasi keuangan Rumah Tangga adalah sebesar 0,33 atau rata – rata pernah menggunakan layanan

produk lembaga keuangan sebesar 3 produk dari 9 produk layanan yang ditawarkan.

Sedangkan variable indeks jaring pengaman social merupakan wujud komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Surakarta memberikan proteksi kepada warga masyarakat Kota Surakarta untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Jaring Pengaman Sosial yang diberikan antara lain Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) untuk sector pendidikan, BPJS dan JAMKESDA di sector kesehatan, Subsidi Perumahan melalui Uang Muka dan Suku Bunga murah untuk kredit kepemilikan rumah disektor perumahan (*real estate*) Program Raskin dan *Food Stamps* disektor pertanian, Subsidi listrik dan Air Bersih bagi Rumah Tangga untuk sector energy. Dengan beragam program jarring pengaman tersebut diharapkan mendorong Rumah Tangga untuk tertarik memulai dan mengembangkan aktifitas UMKM Rumah Tangga khususnya perdagangan Batik, karena Batik merupakan komoditas tekstil unggulan di Kota Surakarta. Deskripsi data menunjukkan bahwa nilai indek jarring pengaman social adalah sebesar 0,17, tertinggi sebesar 0,67 dan rata – rata sebesar 0,41. Indek tersebut menunjukkan bahwa diawal Rumah Tangga memulai usaha pernah menerima program jarring pengaman social minimal 1 program dan maksimal 4 program, dan rata – rata sebesar 2 program dari 6 program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

Disisi lain variable yang menunjukkan bekerjanya fungsi intermediasi lembaga keuangan khususnya sector perbankan yang ditujukan ke sector perdagangan batik di Kota

Surakarta adalah fasilitas kredit yang diterima pelaku usaha di sector tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kredit yang diterima pelaku usaha rata – rata sebesar 26,21 juta dengan nilai minimum 0,00 (tidak menerima fasilitas kredit) dan maksimal sebesar 150 juta. Peningkatan fasilitas kredit diasumsikan akan berdampak pada peningkatan aktivitas UMKM Rumah Tangga khususnya di sector perdagangan Batik di Kota Surakarta. Variabel lain yang diduga berdampak positif terhadap peningkatan aktifitas UMKM Rumah Tangga adalah kondisi pasar yang tercermin dari tingkat permintaan masyarakat terhadap produk Batik, semakin tinggi tingkat permintaan Batik diharapkan pengaruhnya semakin besar. Peningkatan permintaan tersebut berkaitan erat dengan tingkat ekpektasi pelaku usaha di sector tersebut. Perbedaan tingkat ekpektasi yang dihubungkan dengan tingkat penjualan produk mencerminkan peran siklus UMKM dalam mempengaruhi perilaku Rumah Tangga dalam melakukan aktifitas UMKM perdagangan Batik di Kota Surakarta.

Deskripsi karakteristik responden yang secara spesifik dijelaskan sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis pekerjaan pada table 2 menunjukkan bahwa aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga Sektor Perdagangan Batik di Kota Surakarta awal memulai usaha dilakukan oleh 69 responden yang telah memiliki pekerjaan yang tetap dan 31 responden dengan status pekerjaan kontrak. Status pekerjaan tetap mendorong seseorang lebih optimis ketika memulai aktivitas UMKM Rumah Tangga dibandingkan dengan status pekerjaan kontrak. Status pekerjaan tetap lebih besar dibandingkan dengan status pekerjaan kontrak.

Tabel 2 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Usaha	Jenis Pekerjaan		Total
	Kontrak	Tetap	
Usaha Keluarga	30	61	91
Usaha Non Keluarga	1	8	9
Total	31	69	100

Sumber : Data Primer, 2017 (diolah)

Tabel 3 Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenis Usaha	Jenjang Pendidikan					Total
	TS	SD/MI	SMP/ MTS	SMA/MA	Diploma / S1	
Usaha Non Keluarga	1	1	1	6	0	9
Usaha Keluarga	4	4	15	40	28	91
Total	5	5	16	46	28	100

Sumber: Data Primer, 2017 (diolah)

b. Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan

Tabel 3 menunjukkan bahwa aktivitas UMKM Rumah Tangga Sektor Perdagangan Batik di Kota Surakarta diawal memulai usaha dilakukan oleh 5 persen responden yang jenjang pendidikannya tidak sekolah dan atau tidak tamat sekolah, 5 persen responden merupakan lulusan SD/MI, 16 persen responden lulusan SMP/MTS, 46 persen responden lulusan

SMA/MA dan 18 persen responden lulusan Diploma / Sarjana. Statistik tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha Rumah Tangga di perdagangan Batik berdasarkan jenjang pendidikan semakin meningkat. Semakin tinggi jenjang pendidikan diharapkan semakin tertarik untuk meningkatkan aktivitas UMKM Rumah Tangga khususnya perdagangan Batik di Kota Surakarta.

Tabel 4 Responden Berdasarkan Tingkat Literasi Keuangan

Jenis Usaha	Inklusi Keuangan Rumah Tangga						Total
	0,11	0,22	0,33	0,44	0,5	0,67	
Usaha Keluarga	2	35	32	9	6	7	91
Usaha Non Keluarga	0	5	3	0	1	0	9
Total	2	40	35	9	7	7	100

Sumber : Data Primer, 2017 (diolah)

c. Berdasarkan tingkat literasi keuangan rumah tangga tabel 4 menunjukkan aktivitas UMKM RT dengan kategori usaha keluarga memiliki indek literasi keuangan Rumah Tangga lebih baik dibandingkan dengan kategori usaha Non Keluarga. Pengetahuan yang kemudaiian berimpikasi pada penggunaan produk layanan lembaga keuangan perbankan pada kategori usaha keluarga lebih banyak dibandingkan usaha non keluarga. Jumlah usaha keluarga yang telah menggunakan produk layanan perbankan 2 sampai dengan 3 dari 9 layanan yang ditawarkan adalah sebesar 67 persen atau sekitar 67 responden. Sementara untuk kategori usaha non keluarga hanya sebesar 8 persen atau 8 responden. Statistik tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan Rumah Tangga di

Kota Surakarta dapat dinilai baik. Dengan penilaian indek literasi keuangan yang baik tersebut diharapkan mampu menstimulus Rumah Tangga untuk meningkatkan aktifitas usaha UMKM-nya.

d. Berdasarkan indek jaring pengaman sosial Tabel 5 menunjukkan pelaku usaha yang menerima program jaring pengaman social diawal memulai usaha perdagangan batik adalah sebesar 91 reponden untuk kategori usaha keluarga dan 9 persen untuk usaha non keluarga. Program jarring pengaman social yang diterima oleh pelaku usaha perdagangan batik antara 2 sampai dengan 3 program jarring pengaman social dari 6 program yang ditawarkan. AKtivitas UMKM dilevel Rumah



Tangga yang dikategorikan Usaha Keluarga adalah signifikan sebesar 64 persen atau 64 responden. Sementara untuk kategori usaha non keluarga hanya 6 persen atau 6 responden. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Kota Surakadi level Rumah Tangga berkomitmen dalam

memproteksi warga masyarakatnya agar kesejahteraannya makin meningkat, dan diharapkan mampu menstimulus peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga, sebagai media untuk meningkatkan pendapatan dilevel Rumah Tangga.

**Tabel 5 Responden berdasarkan Tingkat Indek Jaring Pengaman Sosial**

Jenis Usaha	Indek Jaring Pengaman Sosial				Total
	0,17	0,33	0,50	0,67	
Usaha Keluarga	15	30	34	12	91
Usaha Non Keluarga	2	2	4	1	9
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2017 (diolah)

e. Berdasarkan fasilitas kredit pada table 6 menunjukkan fasilitas kredit yang diterima pelaku usaha dilevel Rumah Tangga disektor perdagangan Batik adalah sebesar 72 persen berada di interval 0-30 juta, 12 persen diinterval 30-60 juta dan 60-90 juta sebesar 11 persen. Secara keseluruhan jumlah fasilitas kredit yang

diterima pelaku usaha dilevel Rumah Tangga di interval 0-90 juta adalah sebesar 95 persen atau 95 responden. Dengan demikian statistic tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kredit disektor perdagangan batik didominasi kredit dengan plafon sebesar 90 juta ke bawah.

**Tabel 6 Responden Berdasarkan Jumlah Fasilitas Kredit**

Jenis Usaha	Fasilitas Kredit					Total
	0-30	30-60	60-90	90-120	120-150	
Usaha Keluarga	64	11	11	3	2	91
Usaha Non Keluarga	8	1	0	0	0	9
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2017 (diolah)

f. Berdasarkan jumlah persediaan barang pada table 7 menjelaskan jumlah persediaan barang dagangan rata – rata sebesar < 116 unit adalah sebesar 20 persen, 116-232 unit sebesar 20 persen, 232 – 349 unit sebesar 15 persen, 349 – 465 unit sebesar 12 persen, 465 – 581 unit sebesar 5 persen,

581 – 697 unit sebesar 8 persen, 697 – 814 unit sebesar 7 persen dan persediaan barang lebih dari 814 per bulan sebesar 13 persen. Jumlah persediaan barang menyesuaikan dengan jumlah permintaan batik terutama bagi konsumen yang loyal dalam menggunakan produk unggulan tersebut.

**Tabel 7 Responden Berdasarkan Jumlah Persediaan Barang Dagangan**

Jenis Usaha	Jumlah Persediaan Barang Dagangan								Total
	< 116	116- 232	232- 349	349- 465	465- 581	581- 697	697- 814	> 814	
Usaha Keluarga	19	17	13	10	5	8	7	12	91
Usaha Non Keluarga	1	3	2	2	0	0	0	1	9
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2017 (diolah)

Peningkatan jumlah *stock* barang dagangan tersebut juga mencerminkan bahwa aktivitas UMKM Rumah Tangga semakin baik, apalagi jika di ikuti dengan peningkatan jumlah penjualan yang signifikan. Linearitas antara jumlah stock barang dagangan dengan jumlah barang dagangan yang terjual merupakan cerminan siklus UMKM yang dinamis sektor perdagangan Batik.

Sementara berdasarkan jumlah barang dagangan yang terjual, penjualan rata – rata < 116 per bulan mencapai 23 persen, penjualan

116-232 unit per bulan mencapai 25 persen, penjualan rata – rata 232 – 349 unit mencapai 15 persen, penjualan rata – rata 349 – 465 unit sebesar 12 persen, penjualan rata – rata 365 – 581 unit sebesar 6 persen, penjualan rata – rata 581 – 697 unit sebesar 2 persen, penjualan rata – rata 697 – 814 unit sebesar 8 persen dan penjualan rata – rata diatas 814 sebesar 9 persen. Dengan tingkat penjualan yang demikian diharapkan tingkat omset dan keuntungan yang diterima oleh pelaku usaha dilevel Rumah Tangga di sector perdagangan Batik semakin meningkat.

Tabel 8 Responden Berdasarkan Jumlah Penjualan Barang Dagangan

Jenis Usaha	Jumlah Penjualan Barang Dagangan								Total
	< 116	116- 232	232- 349	349- 465	465- 581	581- 697	697- 814	> 814	
Usaha Keluarga	22	22	13	10	6	2	8	8	91
Usaha Non Keluarga	1	3	2	2	0	0	0	1	9
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2017 (diolah)

Peningkatan omset dan keuntungan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga di sector tersebut secara signifikan. Implikasi atas kondisi tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan Rumah Tangga yang merupakan salah satu bentuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi logistik yang hasilnya seperti dalam tabel 9. Hasil Analisis Regresi Logistik sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Logistik

Variabel	(W <sub>1</sub> )	(W <sub>2</sub> )	(W <sub>3</sub> )	(W <sub>4</sub> )
JP	-0,175 (1,991)	-0,188 (1,828)	-0,133 (1,859)	-0,167 (2,006)
JD	2,401** (3,915)	2,812** (4,539)	2,236* (3,323)	2,641** (4,708)
ILKRT	3,142 (0,081)	1,093 (0,000)	4,844 (0,132)	51,139 (0,646)
IJPS	20,051 (1,085)	8,733 (0,617)	15,221 (0,973)	23,723 (1,201)
LFK	5,887*** (7,165)	6,997*** (7,349)	5,272*** (6,219)	5,470*** (6,473)
TP	-0,398 (7,165)	-0,257 (0,975)	2,259 (0,308)	36,537* (2,997)
C	-0,395 (0,132)	1,055 (0,000)	0,183 (0,351)	0,003 (2,171)
Nagelkerke. R <sup>2</sup>	0,330	0,328	0,312	0,360
Hosmer & Lemeshow Test	0,827	0,443	0,609	0,730

Sumber: Data Primer, 2017 (diolah)

Keterangan: Variabel Dependen adalah  $W_{1,2,3,4}$  adalah Aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga (1 jika Usaha Keluarga dan 0 jika usaha non keluarga), Variabel Independen terdiri dari JP yaitu Jenis Pekerjaan (1 jika pekerjaannya tetap dan 0, jika kontrak), JD = Jenjang Pendidikan (0 : Tidak /Tidak Tamat Sekolah, 1 : SD/MI, 2 : SMP/MTS, 3 : SMA/MA, 4 : Diploma/ Sarjana), ILKRT = Indeks Literasi Keuangan Rumah Tangga, IJPS = Indek Jaring Pengaman Sosial, LFK = Logaritma Fasilitas Kredit dari Lembaga Keuangan, TP = Tingkat Penjualan ( memperhatikan kondisi ekpektasi pelaku UMKM, sangat optimis (  $r = 0,90$ ), Optimis (  $r = 0,70$ ), Cukup Optimis (  $r = 0,50$ ) dan Kurang Optimis (  $r = 0,40$ ).

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik seperti dalam tabel 9 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: *Pertama* model regresi *logistic* tersebut adalah *fit* (layak) karena nilai Hosmer & Lemeshow *test* adalah rata – rata sebesar 0,625 (62,50%) atau diatas nilai p value 0,05 (level signifikansi sebesar 5 %), dengan nilai koefisien determinasi (nilai Nagelkerke)  $R^2$  rata – rata sebesar 0,3325 atau 33,25 %. Artinya variasi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 33,25 persen dan sisanya 66,75 persen dijelaskan variabel lain diluar model. Temuan tersebut menunjukkan masih diperlukan elaborasi lebih mendalam mengenai variable lain yang diduga menentukan aktivitas UMKM di Kota Surakarta untuk penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan kualitas informasi bisnis dan profil risiko aktivitas UMKM yang dilakukan rumah tangga. *Kedua* bahwa variabel jenjang pendidikan berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga khususnya perdagangan Batik di Kota Surakarta. Peran variabel jenjang pendidikan rata – rata sebesar 2 kali lebih besar pengaruhnya dalam meningkatkan aktifitas UMKM dilevel Rumah Tangga. Artinya peningkatan 1 jenjang pendidikan akan berdampak positif untuk mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga utamanya perdagangan batik sebesar 2 kali. Oleh karena untuk peningkatan SDM Kota

Surakarta melalui peningkatan jenjang pendidikan merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Surakarta. Pendidikan di Indonesia secara umum memasukkan unsur kewirausahaan dalam kurikulumnya, baik di pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hasil ini menjelaskan bahwa jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan mendorong seseorang untuk memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan memahami budaya organisasi, lebih termotivasi untuk berkembang baik secara individu maupun tim, dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih baik. Hal – hal inilah yang meningkatkan produktivitas dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan aktivitas UMKM di level rumah tangga. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Dragomir dan Panzaru (2015) bahwa pendidikan berpengaruh terhadap spirit untuk menjadi wirausaha, lebih memahami peran wirausaha dalam masyarakat, dan meningkatkan keahlian UMKM.

Ketiga variabel fasilitas kredit yang diberikan ke sektor perdagangan Batik di Kota Surakarta berdampak positif signifikan terhadap peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga. Nilai koefisiennya adalah rata – rata sebesar 5,53, artinya peningkatan fasilitas kredit yang diberikan sektor perbankan ke sektor perdagangan Batik sebesar 1 kali akan berdampak pada peningkatan aktifitas UMKM dilevel Rumah Tangga sebesar 5,53 kali. Dengan demikian pengaruh variabel fasilitas kredit adalah signifikan dengan tingkat elastisitas yang tinggi dalam mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga sektor perdagangan Batik di Kota Surakarta. Lebih lanjut variabel tingkat permintaan berpengaruh positif dan signifikan dalam mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga sektor perdagangan Batik Kota Surakarta. Peningkatan 1 kali tingkat penjualan produk batik berdampak pada peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga sebesar 36,53 kali, dengan catatan kondisi tersebut terjadi pada saat ekpektasi penjualan pelaku usaha

relative rendah ( $r = 0,40$ ). Artinya ketika tingkat ekpektasi penjualan produk hanya sebesar 40 %, tetapi yang terjadi adalah diatas 40 %, maka hal ini akan mendorong peningkatan aktivitas usaha dilevel Rumah Tangga sektor perdagangan Batik sangat signifikan. Tetapi jika ekpektasi tingkat penjualan sebesar 90 %, dan realitas penjualan dibawah 90 %, justru pengaruhnya akan melemahkan aktivitas usaha dilevel Rumah Tangga perdagangan Batik. Temuan ini menjelaskan bahwa adanya kemudahan dalam mengakses kredit meningkatkan kesempatan untuk memulai dan mengembangkan usaha, dan memberikan kepercayaan diri bagi rumah tangga bahwa usahanya dipercaya oleh lembaga keuangan. Adanya fasilitas kredit juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan usahanya. Hasil ini memperkuat temuan Lakdawala (2018) bahwa fasilitas pinjaman yang diberikan bank meningkatkan kepemilikan usaha dan ketersediaan modal pada usaha non pertanian. Temuan ini mengisyaratkan bahwa ekpektasi yang wajar (tidak terlalu berlebihan) justru berpengaruh positif dalam mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan pada saat siklus bisnis relative rendah dan target penjualan dapat dipenuhi maka akan mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga, dan sebaliknya.

Keempat, variabel Literasi Keuangan Rumah Tangga (IKRT) dan Jaring Pengaman Sosial (IJPS) tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga sektor perdagangan batik di Kota Surakarta. *Sign* positif menunjukkan bahwa variabel tersebut tetap memberikan kontribusi positif dalam mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga. Oleh karena itu program untuk mendorong akselerasi peningkatan inklusi keuangan dan jaring pengaman sosial perlu ditingkatkan sampai pada level mampu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga. Pengaruh literasi keuangan rumah tangga yang tidak signifikan karena

tingginya perilaku menghindari risiko (*high risk aversion*) oleh rumah tangga untuk memulai UMKM keluarga. Temuan sesuai dengan hasil penelitian Coliendo et al (2009) yang menjelaskan bahwa dampak literasi keuangan signifikan dalam meningkatkan usaha sendiri (*self-employment*) dengan prasyarat individu tersebut perilaku menghindari risikonya lebih rendah (*lower risk aversion*). Dengan kata lain tingkat literasi keuangan rumah tangga di Kota Surakarta, belum mampu menjadi modal pengetahuan yang kuat untuk mengelola sumber daya keuangan secara bijak, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi guna meningkatkan keuntungan (imbal hasil) yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, insignifikansi program jaring pengaman social selaras dengan temuan Jamaruddin dan Rozita (2017) bahwa program jaring pengaman social tidak secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, dimana dalam ini tersebut terdapat program pemberdayaan dan peningkatan usaha mikro dan kecil yang dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas dan kualitas pengetahuan ketrampilan belum mampu mencapai target program yang ditetapkan, terbatasnya faktor finansial, informasi, komunikasi dan teknologi, perbedaan budaya dan jenis asistensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Program jaring pengaman social akan efektif jika berbagai factor tersebut dapat diatasi, terutama factor pengetahuan dan ketrampilan harus mampu meningkatkan motivasi untuk berUMKM dengan asistensi (pendampingan) yang tepat, terencana dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Sementara itu variabel status pekerjaan *sign*-nya negatif, memberi signal bahwa status pekerjaan tetap mendorong seseorang berada pada zona aman dan kurang *attractiveness* sehingga justru berdampak negatif terhadap peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga khususnya sektor perdagangan batik di Kota Surakarta. Hal menjelaskan bahwa jenis pekerjaan tetap dengan penghasilan lebih dari cukup (diatas UMK) menjadi disinsentif bagi

rumah tangga tersebut untuk memulai usaha keluarga. Hal lain yang terjadi adalah bahwa jenis pekerjaan tersebut tidak memberikan pengalaman kerja yang relevan untuk memulai UMKM. Oleh karena itu jenis pekerjaan tetap dengan pengalaman yang relevan berdampak signifikan terhadap peningkatan keinginan individu / rumah tangga untuk memulai usaha (Khan, et al, 2016 Berdasarkan temuan diatas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendorong peningkatan aktivitas UMKM antara lain menjaga ekspektasi wajar dalam menjalankan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga adalah langkah yang tepat, agar mampu mempertahankan dan meningkatkan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga di sektor perdagangan Batik di Kota Surakarta, terutama ketika kondisi siklus UMKM secara keseluruhan dilevel pelambatan atau *decline*. Mendorong rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang lebih baik untuk mengambil peran dalam membangun UMKM keluarga utama disektor perdagangan batik merupakan prioritas, agar aktivitas UMKM lebih meningkat secara signifikan. Pandangan dan perilaku di zona aman perlu direduksi untuk meningkatkan iklim UMKM yang lebih baik di Kota Surakarta.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka temuan dalam penelitian ini adalah (1) Fungsi intermediasi yang tercermin dari fasilitas kredit yang ditujukan ke sektor perdagangan batik mampu mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga di Kota Surakarta. (2) Variabel literasi keuangan yang diprogramkan oleh lembaga keuangan di Kota Surakarta dan program jaring pengaman sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta belum efektif dalam mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga terutama pada sector perdagangan Batik, meskipun demikian program – program tersebut tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar pengaruhnya nyata dalam meningkatkan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga. Faktor lemahnya control dari penerima program jaring pengaman social menjadi

penentu pengaruh variable tersebut insignifikan. (3) Faktor demografi – status pekerjaan tetap cenderung tidak tertarik untuk meningkatkan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga sektor perdagangan batik. Status pekerjaan tetap mendorong seseorang berada di zona aman (*high risk aversion*) dan kurang *attractiveness* dalam meningkatkan aktivitas usahanya dilevel Rumah Tangga. Oleh karena itu, dengan temuan ini pemerintah perlu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat Kota Surakarta yang status pekerjaannya tetap agar berperan dalam meningkatkan usaha perdagangan batik melalui program edukasi dan pelatihan kewirausahaan, insentif bagi pelaku UMKM rumah tangga yang berhasil mengembangkan usaha dengan pengurangan pajak, produknya dipasarkan oleh dinas terkait, dan program non ekonomi seperti pelatihan kepemimpinan, komunikasi, dan pengembangan ketrampilan pekerja.

Implikasi kebijakan sebagai konsekuensi atas temuan tersebut antara lain: (1) Peningkatan fungsi intermediasi perbankan khususnya yang ditujukan ke sektor perdagangan Batik perlu ditingkatkan karena terbukti mampu mendorong peningkatan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga di Kota Surakarta. (2) Program peningkatan kualitas SDM terutama yang terkait langsung dengan sektor perdagangan batik, agar aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga meningkat signifikan dan diharapkan kedepan dapat mengerakkan perekonomian Kota Surakarta. (3) Evaluasi pelaksanaan program literasi keuangan dan program jaring pengaman sosial oleh otoritas terkait agar program tersebut mampu mendukung pengembangan aktivitas UMKM dilevel Rumah Tangga di Kota Surakarta, terutama untuk membangun budaya *low risk aversion* dan kontrol yang tinggi dalam pemanfaatan program jaring pengaman sosial. Sedangkan, keterbatasan dan saran adalah (1) Tidak diketahuinya jumlah populasi menjadi faktor kendala untuk menentukan jumlah *sample* yang proporsional. Pendataan dan akurasi data mengenai Rumah Tangga yang telah menerima program jaring pengaman sosial dan telah memahami inklusi keuangan

Rumah Tangga sangat terbatas. (2) Jumlah *sample* yang masih relative terbatas diduga menjadi penyebab beberapa variabel hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, M., & Trivieri, F. 2010. *Is banking competition beneficial to SMEs? An empirical study based on Italian data. Small Business Economics*, 35 (3), 335-355.
- Caliendo, Marco; Fossen, Frank M., and Kritikos, Alexander S. 2009. *Risk attitudes of nascent entrepreneurs—new evidence from an experimentally validated survey. Small Business Economics*, 32, 153–167
- Dhanani, Shafiq., & Islam, Iyanatul. 2002. *Poverty, Vulnerability and Social Protection in a Period of Crisis: The Case of Indonesia. World Development*, 30 (7), 1211-1231.
- Dotsey, M., Li, W., & Yang, F. 2015. *Home production and Social Security reform. European Economic Review*, 73, 131-150.
- Dragomir, Camelia Cristina, Panzaru, Stelian, 2015. *The Relationship Between Education and Entrepreneurship in EU Member States. Review of General Management*, 22(2), 55-65.
- Fok, R. C. W., Chang, Y.-C., & Lee, W.-T. 2004. *Bank Relationships and Their Effects on Firm Performance around the Asian Financial Crisis: Evidence from Taiwan. Financial Management*, 33(2), 89-112.
- Fraser, D. R., Wallace Phillips, J., & Rose, P. S. 1974. *A Canonical Analysis of Bank Performance. The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 9(2), 287-295.
- Imrohorglu, A., & Zhao, K. 2017. *Intergenerational transfers and China's social security reform. The Journal of the Economics of Ageing*, xxx, xxx-xxx.
- Jamaruddin, Rozita Binti Arshad 2017. *Social Safety Nets To The Quality of Life in Indonesia. International Journal of Humanities & Social Science Studies*, 3(4), 96-108.
- Khan, Shafqat Mehmood, Rehman, Muqaddas, Rehman, Chaudhary Abdul. 2016. *Work experience and entrepreneurship: evidence from various industries of (Lahore) Pakistan. Sci.Int.Lahore*, 28 (1), 571-583.
- Lakdawala, Leah, 2018. [From Loans to Labor: Access to Credit, Entrepreneurship, and Child Labor, Working Papers 2018-4, Michigan State University, Department of Economics.](#)
- Naude, Wim. 2013. *Entrepreneurship and Economic Development: Theory, Evidence and Policy. Discussion Paper 7505, University of Maastricht.*
- Raj, S. N. R., Sen, K., & Kathuria, V. 2014. *Does banking development matter for new firm creation in the informal sector? Evidence from India. Review of Development Finance*, 4, 38-49.
- Ravichandran, T., & Lertwongsatien, C. 2005. *Effect of Information Systems Resources and Capabilities on Firm Performance: A Resource-Based Perspective. Journal of Management Information Systems*, 21(4), 237-276.
- Sumarto, Sudarno., Suryahadi, Asep., Widyanti, Wenefrida., 2002. *Designs and Implementation of Indonesian Social Safety Net Program. The Developing Economies*, 10(1), 3-31.
- Swamy, V. 2014. *Financial Inclusion, Gender Dimension, and Economic Impact on Poor Households. World Development*, 56, 1-15.
- Tran, C. 2016. *Fiscal Policy as a Temptation Control Device: Savings Subsidy and Social Security. Economic Modelling*, 55, 254-268.